

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu fungsi pelayanan publik paling fundamental yang menjadi tanggung jawab negara dalam kerangka *good governance*. Dalam perspektif administrasi publik, pendidikan bukan sekadar hak individual, melainkan investasi strategis negara untuk membangun modal manusia yang produktif, memutus rantai kemiskinan intergenerasi, dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Dokumen SDGs 2030 menegaskan komitmen global untuk "*providing inclusive and equitable quality education at all levels*" dan menjamin "*access to life-long learning opportunities*" bagi semua orang (United Nations, 2015)

Namun, realitas global menunjukkan kesenjangan dramatis antara komitmen normatif dan implementasi pelayanan publik pendidikan. *The Sustainable Development Goals Report 2024* mengungkapkan bahwa progres menuju SDG 4 sangat lambat sejak 2015, dengan hanya 58% siswa di seluruh dunia mencapai profisiensi minimum dalam membaca pada 2019 (United Nations, 2024). Kondisi ini memburuk pasca-pandemi COVID-19, dengan penurunan signifikan dalam skor matematika dan membaca di banyak negara, mengindikasikan adanya faktor-faktor struktural yang lebih dalam di luar dampak pandemi. Untuk mencapai target nasional 2030, negara-negara harus mendaftarkan 1,4 juta anak per tahun ke pendidikan anak usia dini dan menerima satu anak baru ke sekolah setiap dua detik hingga 2030, sebuah target yang menunjukkan betapa jauhnya jarak antara komitmen dan realitas.

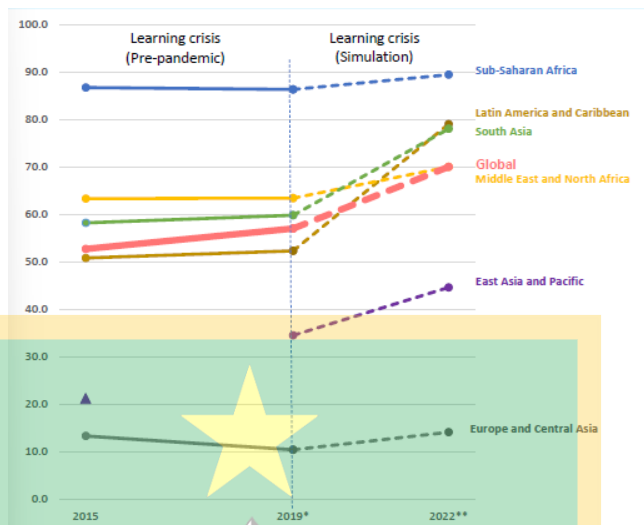
Keterkaitan antara pendidikan dan pengentasan kemiskinan semakin jelas ketika SDG 1 menekankan bahwa pendidikan menjadi instrumen strategis untuk membangun resiliensi masyarakat miskin. Pada tahun 2022, tercatat 712 juta orang (9% dari populasi dunia) masih hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan pendapatan kurang dari US\$2,15 per hari, dan proyeksi menunjukkan 590 juta orang akan tetap berada dalam kemiskinan ekstrem hingga 2030 jika tren saat ini berlanjut (United Nations, 2024). Yang lebih mengkhawatirkan, 1,4 miliar anak tidak tercakup dalam program perlindungan sosial pada tahun 2023, yang

berdampak langsung pada akses mereka terhadap layanan dasar termasuk pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan memiliki hubungan siklus yang saling memperkuat: anak-anak dari keluarga miskin cenderung putus sekolah atau mengalami kualitas pembelajaran rendah, yang kemudian mereplikasi kemiskinan orang tua mereka ketika memasuki dunia kerja.

Untuk mengukur krisis pembelajaran global secara lebih presisi, Bank Dunia dan UNESCO mengembangkan konsep *learning poverty* ketidakmampuan membaca dan memahami teks sederhana pada usia 10 tahun. Indikator ini menggabungkan dua dimensi kritis: anak yang belum membaca minimal di sekolah, dan anak yang tidak bersekolah sama sekali (World Bank et al., 2022). Usia 10 tahun menjadi titik krusial karena pada usia ini anak seharusnya sudah mampu membaca dengan lancar untuk belajar mata pelajaran lain. Kegagalan membaca di usia ini menciptakan efek domino kesulitan dalam matematika, IPA, dan pelajaran lainnya yang terakumulasi sepanjang masa sekolah dan bahkan hingga dewasa.

Data pra-pandemi COVID-19 sudah menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan: 57% anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak dapat membaca dan memahami cerita sederhana pada akhir sekolah dasar, sementara di Sub-Sahara Afrika angka ini mencapai 86% (World Bank et al., 2022). Angka-angka ini sangat mengkhawatirkan karena berarti lebih dari separuh anak-anak tidak mendapatkan hak pendidikan yang seharusnya mereka terima bukan karena mereka tidak bersekolah, tetapi karena sekolah gagal mengajarkan mereka keterampilan paling dasar.

Gambar 1 Learning poverty berdasarkan Wilayah (2015, 2019, dan Simulasi 2022)



Sumber: World Bank *et al.* (2022), *The State of Global Learning poverty: 2022 Update*

Gambar 1 menunjukkan stagnasi dan bahkan memburuknya *learning poverty* global antara 2015-2019, yang kemudian diperburuk drastis oleh pandemi COVID-19. Angka simulasi 2022 mengungkapkan bahwa dampak penutupan sekolah telah menghapus seluruh pencapaian pembelajaran yang telah dicapai sejak tahun 2000, dengan peningkatan paling dramatis terjadi di Amerika Latin & Karibia (dari 52,3% menjadi 79,0%) dan Asia Selatan (dari 59,8% menjadi 78,0%). Di negara berpenghasilan rendah, kondisi yang sudah sangat buruk (90,6% pada 2019) hampir tidak berubah karena tingkat *learning poverty* sudah mendekati saturasi hampir semua anak sudah mengalami *learning poverty* bahkan sebelum pandemi.

Dampak ekonomi jangka panjang dari krisis pembelajaran ini sangat masif. Tanpa pembelajaran dasar yang kuat, siswa sering gagal berkembang di sekolah atau ketika memasuki dunia kerja mereka tidak memperoleh modal manusia yang dibutuhkan untuk menggerakkan karir dan ekonomi. Tanpa tindakan, generasi siswa saat ini berisiko kehilangan \$21 triliun dalam nilai sekarang dari penghasilan seumur hidup, atau setara dengan 17% dari PDB global saat ini (World Bank *et al.*, 2022). Angka yang sangat besar ini menunjukkan betapa mahalnyanya biaya kegagalan sistem pendidikan bukan hanya bagi individu, tetapi bagi perekonomian global secara keseluruhan.

Programme for International Student Assessment (PISA) yang dilaksanakan oleh OECD setiap tiga tahun mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam literasi, matematika, dan sains untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia telah berpartisipasi dalam PISA sejak tahun 2000, dan laporan PISA 2022 yang dipublikasikan pada Desember 2023 mengungkapkan krisis pembelajaran yang serius dan sistemik.

Hanya 18% siswa Indonesia mencapai kompetensi minimum dalam matematika, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar 69% sebuah kesenjangan yang menunjukkan bahwa lebih dari 8 dari 10 siswa Indonesia tidak memiliki kemampuan matematis dasar yang diharapkan dari siswa usia 15 tahun. Untuk membaca, hanya 25% siswa yang mencapai standar minimum, sementara rata-rata OECD adalah 74%. Dalam sains, kondisinya sedikit lebih baik namun tetap mengkhawatirkan, dengan hanya 34% siswa mencapai kompetensi minimum dibandingkan 76% di negara-negara OECD (OECD, 2023).

Tabel 1 Perbandingan Pencapaian Kompetensi Minimum Indonesia dengan Rata-rata OECD

Negara/Wilayah	Matematika (%)	Membaca (%)	Sains (%)
Indonesia	18	25	34
Rata-rata OECD	69	74	76

Sumber: OECD (2023), *PISA 2022 Results*

Tabel 1 mengungkapkan kesenjangan yang mengkhawatirkan antara Indonesia dengan rata-rata OECD dan negara-negara Asia lainnya. Kesenjangan 51 poin persentase dalam matematika berarti bahwa proporsi siswa Indonesia yang mencapai kompetensi minimum hanya seperempat dari rata-rata OECD. Perbandingan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya menambah urgensi permasalahan ini. Singapura konsisten menduduki peringkat teratas PISA dengan lebih dari 90% siswa mencapai kompetensi minimum di ketiga bidang. Malaysia dan Thailand, meskipun tidak seprestisius Singapura, juga menunjukkan performa yang lebih baik daripada Indonesia. Kesenjangan ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kesiapan generasi muda Indonesia untuk bersaing dalam ekonomi global yang semakin menuntut keterampilan kognitif tinggi.

Jika data PISA 2022 mengungkap kegagalan dari sisi kualitas pembelajaran, data putus sekolah menunjukkan kegagalan dari dimensi aksesibilitas dua sisi dari kegagalan sistemik pelayanan publik pendidikan yang saling memperkuat. Pada Agustus 2024, tercatat 4,6 juta anak Indonesia yang putus sekolah, dengan rincian 649.600 anak pada jenjang SD/ sederajat, 1.067.214 anak pada jenjang SMP/ sederajat, dan 371.942 anak pada jenjang SMA/ sederajat (Usaha, 2025).

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari jutaan potensi modal manusia yang terbuang, jutaan peluang ekonomi yang hilang, dan jutaan keluarga yang terjebak dalam siklus kemiskinan intergenerasi. Di balik setiap angka terdapat cerita anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, keluarga yang terpaksa memprioritaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek di atas investasi pendidikan jangka panjang, dan komunitas yang kehilangan sumber daya manusia yang dapat menjadi agen perubahan.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa putus sekolah bukan fenomena yang terdistribusi merata, melainkan terkonsentrasi pada kelompok-kelompok *marginal*: anak-anak dari keluarga prasejahtera, anak-anak di daerah terpencil dan perbatasan, anak-anak dengan disabilitas, dan anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Distribusi yang tidak merata ini mengungkapkan bahwa sistem pendidikan nasional belum berhasil memenuhi mandat konstitusional untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warga negara.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan konstitusional untuk solusi alternatif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) memberikan pengakuan komprehensif terhadap pluralitas jalur pendidikan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", sementara Pasal 13 ayat (1) mengakui bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pengakuan terhadap pendidikan informal bukan sekadar klausul administratif, melainkan merepresentasikan kesadaran bahwa sistem pendidikan formal memiliki keterbatasan inheren dalam menjangkau semua anak dengan

kebutuhan yang beragam. Pasal 26 menegaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang masing-masing setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA memberikan jalur alternatif yang sah bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses atau bertahan dalam sistem formal (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003)

Lebih jauh, UU Sisdiknas Pasal 8 dan Pasal 54 ayat (1) memberikan legitimasi hukum yang eksplisit bagi organisasi berbasis komunitas untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Regulasi ini sangat penting karena memberikan ruang legal bagi yayasan, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengambil peran aktif dalam menyediakan layanan pendidikan. Dengan kata lain, negara mengakui bahwa masyarakat bukan hanya penerima layanan pendidikan, tetapi juga mitra aktif dalam menyelenggarakan pendidikan sebuah prinsip yang sejalan dengan konsep *community development* dan inovasi akar rumput.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU RI No 25 Tahun 2009) memberikan kerangka hukum yang jelas tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Pasal 5 ayat (2) UU ini secara eksplisit menyebutkan pendidikan sebagai salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang wajib disediakan oleh negara. Lebih lanjut, Pasal 39 UU 25/2009 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk “kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.” Bahkan, Pasal 39 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.” Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi organisasi berbasis komunitas seperti Yayasan Rumah Langit untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi kelompok marginal.

UU 25/2009 juga memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan. Pasal 4 huruf j menetapkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan “fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.” Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa “pemberian kemudahan terhadap kelompok

rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.” Anak-anak dari keluarga prasejahtera yang mengalami hambatan akses pendidikan seperti yang dilayani oleh Rumah Langit jelas termasuk dalam kategori kelompok rentan yang dimaksud dalam UU ini. Namun, meskipun UU 25/2009 memberikan landasan hukum yang kuat bagi peran organisasi masyarakat dalam pelayanan publik, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Yayasan Rumah Langit, yang telah beroperasi sejak 2018 dengan legalitas resmi (SK AHU Nomor AHU-0004439.AH.01.04.Tahun 2018), belum pernah menerima dukungan apapun dari pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah ketiadaan dukungan disebabkan oleh belum adanya upaya organisasi untuk mengajukan proposal kerjasama kepada pemerintah, ataukah karena adanya hambatan struktural dalam mekanisme kerjasama antara pemerintah dan organisasi informal berbasis komunitas?

Pengakuan konstitusional ini memberikan landasan bagi inovasi pelayanan pendidikan alternatif yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil. Pemerintah telah merespons krisis putus sekolah melalui program Sekolah Rakyat yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto pada 3 Januari 2025. Per September 2025, telah beroperasi 100 Sekolah Rakyat dengan target 165 sekolah pada akhir September 2025 dan penambahan 100 sekolah per tahun hingga mencapai 500 sekolah dalam lima tahun mendatang (Ernowo, 2025). Namun, meskipun menunjukkan komitmen pemerintah, jangkauannya masih sangat terbatas dibandingkan skala permasalahan 4,6 juta anak putus sekolah. Keterbatasan ini menegaskan urgensi peran inovasi akar rumput yang telah beroperasi sejak lebih awal untuk mengisi gap pelayanan publik pendidikan di tingkat komunitas.

Krisis pembelajaran nasional yang telah dijelaskan bukan hanya sekadar angka statistik yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur kawasan padat penduduk dengan banyak keluarga prasejahtera masalah pelayanan pendidikan terlihat sangat nyata. Sebagian besar anak-anak di kawasan ini tercatat dan hadir di sekolah formal, namun tidak mendapat pembelajaran berkualitas yang cukup untuk menguasai kemampuan dasar sesuai tingkat kelasnya. Anak-anak dari keluarga prasejahtera yang orang tuanya bekerja sebagai pemulung, tukang sampah, ojek *online*, pengupas bawang,

atau pedagang kecil menghadapi tantangan berlapis: rasio guru-siswa yang sangat tinggi (40-50 siswa per kelas), kekurangan guru berkualitas, infrastruktur yang tidak memadai, serta keterbatasan sumber belajar.

Kondisi ini diperparah oleh karakteristik anak-anak dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan perhatian ekstra namun justru tidak mendapatkannya. Banyak anak datang ke sekolah dengan kesiapan belajar yang rendah kurang tidur, kekurangan gizi yang mempengaruhi konsentrasi, atau beban psikologis karena masalah ekonomi keluarga. Di rumah, mereka tidak mendapatkan dukungan pembelajaran karena orang tua yang mayoritas hanya lulusan SD atau SMP tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk membantu anak belajar. Lebih jauh, sistem evaluasi di sekolah formal seringkali lebih menekankan pada kehadiran dan angka kelulusan daripada penguasaan kompetensi yang sebenarnya. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan promosi otomatis tidak hanya mempengaruhi hilangnya minat belajar siswa, tetapi juga berdampak pada menurunnya kompetensi akademik siswa (Nainggolan et al., 2024). Akibatnya, banyak siswa "naik kelas" bukan karena menguasai materi, melainkan karena pertimbangan administratif, dan terus terbawa ke jenjang yang lebih tinggi dengan fondasi kompetensi yang sangat lemah.

Fenomena ini menciptakan akumulasi defisit pembelajaran yang semakin membesar seiring waktu. Siswa yang tidak menguasai kemampuan dasar di kelas 1 SD (misalnya membaca dan berhitung sederhana) terus dibawa ke kelas 2, 3, dan seterusnya tanpa memperbaiki defisit tersebut. Ketika mencapai jenjang SMP atau SMA, mereka sudah tertinggal sangat jauh dan kesulitan mengikuti pelajaran karena tidak menguasai kemampuan dasar yang seharusnya dipelajari di kelas-kelas awal. Sistem tidak memungkinkan siswa tinggal kelas dalam jumlah besar karena pertimbangan administratif (sekolah dinilai buruk jika banyak siswa tinggal kelas), sehingga menciptakan ilusi keberhasilan pendidikan dalam statistik, sementara realitas di lapangan menunjukkan kegagalan pembelajaran yang masif.

Di tengah kegagalan sistemik ini, muncul kebutuhan mendesak akan pembelajaran tambahan yang bersifat remedial, personal, dan kontekstual yang tidak dapat disediakan oleh sekolah formal yang *overload*. Anak-anak di Kelurahan Tengah membutuhkan ruang belajar alternatif yang dapat memberikan perhatian

individual sesuai tingkat kemampuan masing-masing, pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan menyenangkan tanpa tekanan evaluasi formal, dukungan emosional dan motivasi, serta akses terhadap sumber belajar dan bimbingan yang tidak mampu disediakan oleh orang tua mereka.

Dalam konteks inilah Yayasan Rumah Langit menjadi sangat penting dan relevan. Rumah Langit lahir bukan dari program *top-down* pemerintah, melainkan dari kepedulian langsung komunitas akar rumput yang melihat kebutuhan konkret anak-anak di sekitar mereka. Didirikan pada 5 Desember 2018 di Kelurahan Tengah sebagai respons terhadap kondisi anak-anak pemulung yang belum bersekolah formal, Rumah Langit kemudian beradaptasi ketika lapak pemulung digusur dan anak-anak tersebut menyebar. Transformasi target sasaran dari anak pemulung yang belum sekolah formal menjadi anak-anak prasejahtera yang sudah bersekolah formal namun membutuhkan pembelajaran tambahan menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas inovasi akar rumput terhadap perubahan konteks dan kebutuhan riil komunitas.

Rumah Langit mengisi gap kritis antara "akses pendidikan formal" dengan "kualitas pembelajaran efektif" sebuah gap yang tidak terlihat dalam statistik administratif namun sangat nyata dalam pengalaman keseharian anak-anak. Setelah memperoleh legalitas melalui SK No. AHU-0004439.AH.01.04 Tahun 2018, Rumah Langit menyelenggarakan empat program utama: (1) kegiatan belajar mengajar terstruktur setiap Senin-Jumat pukul 14.00-16.00; (2) *study tour* edukasi tahunan; (3) program gizi seimbang melalui pemberian makanan gratis setelah pembelajaran; dan (4) kerja sama dengan Yayasan Nara Kreatif untuk penyaluran ke program kejar paket. Dampak nyata telah terlihat: sejak 2017, 2 anak putus sekolah berhasil kembali ke sekolah formal, 3 anak berhasil lulus melalui kejar paket A pada 2020, 4 anak mengikuti kejar paket pada 2024, dan beberapa alumni melanjutkan hingga Paket C bahkan perguruan tinggi.

Dalam perspektif administrasi publik, Rumah Langit merepresentasikan model inovasi pelayanan publik berbasis komunitas yang melengkapi kapasitas negara dalam memenuhi mandat konstitusional pendidikan berkualitas bagi semua warga negara. Ketika sistem formal gagal menjangkau dimensi kualitas pembelajaran, inovasi akar rumput seperti Rumah Langit mengisi kekosongan

dengan pendekatan *bottom-up* yang fleksibel, responsif, dan kontekstual terhadap kebutuhan lokal spesifik.

Penting untuk ditekankan bahwa Rumah Langit tidak menggantikan peran sekolah formal, melainkan melengkapi dan memperkuat fungsi pelayanan publik pendidikan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh sistem formal yang bersifat massal dan terstandar. Dalam terminologi pelayanan publik, Rumah Langit berperan sebagai *complementary service provider* yang mengisi gap spesifik dalam ekosistem pendidikan. Model komplementer ini menunjukkan bahwa solusi terhadap krisis pendidikan membutuhkan sinergi antara intervensi *top-down* pemerintah seperti Sekolah Rakyat dan inovasi *bottom-up* berbasis komunitas seperti Rumah Langit.

Namun, studi komprehensif tentang bagaimana proses inovasi akar rumput seperti Rumah Langit muncul, berkembang, dan berkelanjutan termasuk peran kepemimpinan, mobilisasi sumber daya, kolaborasi dengan *stakeholder*, serta faktor pendorong dan penghambat masih sangat minim. Meskipun literatur tentang inovasi pendidikan dan inovasi akar rumput telah berkembang, terdapat kesenjangan signifikan dalam penelitian yang menghubungkan kedua domain tersebut, khususnya dalam konteks sektor ketiga (organisasi masyarakat sipil/yayasan).

Penelitian inovasi akar rumput di Indonesia cenderung fokus pada bidang ekonomi dan pariwisata. Misalnya, studi (Laksmiana, 2020) tentang Desa Wisata Pentingsari mengeksplorasi proses pemunculan inovasi dan kepemimpinan akar rumput dalam konteks pengembangan desa wisata. Studi-studi lain banyak mengkaji inovasi teknologi tepat guna, usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis komunitas, atau pengembangan produk lokal. Sementara studi-studi ini memberikan wawasan penting tentang dinamika inovasi akar rumput, mereka tidak dapat langsung ditransfer ke konteks pendidikan yang memiliki karakteristik unik *output* pendidikan bersifat jangka panjang dan sulit diukur, *stakeholder* sangat beragam (anak, orang tua, komunitas, pemerintah), dan dimensi etis dan moral sangat kental.

Di sisi lain, diskusi tentang inovasi pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan *top-down* yang diprakarsai pemerintah, seperti kebijakan

Kurikulum Merdeka, program bantuan pendidikan (Kartu Jakarta Pintar, Indonesia Pintar), atau digitalisasi pendidikan. Model *bottom-up* yang lahir dari inisiatif komunitas akar rumput khususnya yang dikelola oleh yayasan atau organisasi sektor ketiga belum banyak diteliti secara akademis.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji dimensi tertentu dari inovasi dan pendidikan berbasis komunitas, namun belum secara komprehensif mengintegrasikan keduanya dalam konteks Indonesia. (Seyfang & Smith, 2007) menganalisis inovasi akar rumput untuk pembangunan berkelanjutan, namun fokusnya pada inovasi teknologi dan lingkungan di konteks Eropa, bukan pada sektor pendidikan informal di negara berkembang. (Bray, 2003) membahas inisiatif pendidikan berbasis komunitas dan hubungannya dengan pemerintah, tetapi tidak secara spesifik mengkaji proses kemunculan dan keberlanjutan inovasi akar rumput menggunakan *framework* teoretis yang komprehensif.

Dalam konteks pemerintah yang sedang mengembangkan konsep Sekolah Rakyat untuk mengatasi 4,6 juta anak putus sekolah, pembelajaran dari praktik Rumah Langit dapat memberikan *insights* berharga tentang model pelayanan pendidikan berbasis komunitas yang efektif dan berkelanjutan. Pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu dijawab meliputi: Bagaimana sebuah inovasi akar rumput seperti Rumah Langit muncul dan berkembang tanpa dukungan formal pemerintah? Faktor-faktor apa yang memungkinkan keberlanjutan operasional meskipun dengan sumber daya yang sangat terbatas? Bagaimana pola pengambilan keputusan yang memungkinkan fleksibilitas dan responsivitas tinggi? Apa yang dapat dipelajari oleh pemerintah dari model ini untuk diterapkan atau difasilitasi dalam skala yang lebih luas?

Dengan demikian, penelitian tentang inovasi akar rumput dalam pengembangan pelayanan pendidikan di Yayasan Rumah Langit tidak hanya mengisi kesenjangan akademik dalam literatur tentang inovasi akar rumput dan pendidikan berbasis komunitas di Indonesia, tetapi juga merespons kebutuhan mendesak untuk menemukan solusi alternatif bagi krisis pendidikan Indonesia yang kompleks dan multidimensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika inovasi akar rumput di sektor pendidikan, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi serupa dan menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi dan mendukung inovasi berbasis komunitas dalam pelayanan publik pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana peran akar rumput dalam pengembangan inovasi pelayanan pendidikan di Yayasan Rumah Langit?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran akar rumput dalam pengembangan inovasi pelayanan pendidikan di Yayasan Rumah Langit sebagai respons terhadap kegagalan sistemik pendidikan formal.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya merumuskan masalah dan menentukan tujuan penelitian saja, tetapi penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta wawasan yang bermanfaat bagi objek penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut penjelasannya, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada:

1. Pengembangan literatur tentang inovasi akar rumput dalam pelayanan publik pendidikan di Indonesia.
2. Memperkaya diskusi teoritis tentang peran organisasi masyarakat sipil dalam melengkapi fungsi negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik pendidikan.
3. Memberikan kerangka analitis untuk memahami proses kemunculan, pengembangan, dan keberlanjutan inovasi berbasis komunitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pengambil kebijakan pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan alternatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak pra sejahtera.
2. Organisasi sektor ketiga dan yayasan pendidikan dalam mereplikasi dan mengadaptasi model pendidikan berbasis komunitas di konteks lokal lain.

3. Masyarakat dan komunitas akar rumput untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan yang lebih besar terhadap peran mereka dalam ekosistem pendidikan nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mencakup fenomena global dan nasional krisis pembelajaran, konteks lokal di Jakarta Timur, profil Yayasan Rumah Langit, serta kesenjangan penelitian yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teoretis dan konseptual yang menjadi kerangka analisis penelitian, meliputi konsep inovasi akar rumput (*grassroots innovation*), teori inovasi sosial, peran sektor ketiga dalam pelayanan publik, pendidikan informal dan pendidikan kesetaraan, serta kepemimpinan akar rumput. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan (kualitatif dengan desain studi kasus), lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian dan teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, observasi, dokumentasi), teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan serta pembahasan mengenai peran inovasi akar rumput dalam pengembangan pelayanan publik pendidikan di Yayasan Rumah Langit. Penyajian hasil penelitian didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori inovasi akar rumput. Bab ini dibagi ke dalam beberapa subbab yang disusun secara sistematis untuk

menggambarkan konteks penelitian, proses inovasi, bentuk inovasi pelayanan publik, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan inovasi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta memuat implikasi dan saran. Saran ditujukan kepada Yayasan Rumah Langit, pemerintah (khususnya Dinas/Suku Dinas Pendidikan), dan pihak lain yang relevan, serta rekomendasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang inovasi akar rumput dan pelayanan publik pendidikan.

